

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perekonomian perusahaan terdapat salah satu fenomena yang bisa dibahas terkait dampak tingkah laku para manajemen terhadap manajemen laba. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi memberikan peningkatan terhadap kualitas dalam mengembangkan perekonomian di negara Indonesia ini salah satunya beberapa perusahaan mulai mengembangkan sistem dalam proses mencari laba atau menghasilkan keuntungan mulai dengan perubahan penyusunan tata kelola perusahaan dan bagaimana proses perputaran laba. Salah satu kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah bagaimana perusahaan dalam memilih karyawan yang akan di jadikan anggota dalam manajemen laba, banyaknya kasus yang terjadi akibat kekeliruan perusahaan itu sendiri dalam memilih dan memutuskan sehingga banyak terjadinya kasus memanipulasi data mulai dari *mark up*, lalu mengecilkan atau membesarkan laba yang secara tidak langsung dapat merugikan pihak-pihak berkepentingan. Manajemen laba dapat terjadi dengan cara penyusunan laporan keuangan yang menggunakan dasar akrual. Metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang akan untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Akuntansi akrual memiliki sistem pada prinsip akuntansi yang berterima umum memberikan manajer kesempatan untuk membuat alasan estimasi akuntansi yang akan memberi pengaruh kepada pendapatan yang dilaporkan.

Penyajian laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab manajemen pada calon investor pada umumnya dan pemegang saham pada khususnya. Jensen dan Meckling (1976) dalam Azwari (2016;176) menyatakan bahwa struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Pelaporan keuangan sendiri bertujuan memberikan informasi yang berguna untuk pemegang saham. Adanya kelayakan pada laporan keuangan mampu memenuhi keperluan para pengguna terutama yang berkaitan dengan validasi informasi tersebut. Seperti pendapat Jensen & Meckling

(1976) dalam Hamdani (2016;281) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih principal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Informasi yang disampaikan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, walau pada kenyataannya masih sering terjadi penyelewengan oleh manajemen terhadap praktiknya laporan keuangan. Adanya audit yang berfungsi sebagai proses yang mengurangi kesenjangan informasi antara manajer dengan para pemegang saham dengan menggunakan pihak eksternal yang membantu dalam pengesahan terhadap laporan keuangan.

Penelitian ini didukung dengan beberapa fenomena yang terjadi pada perusahaan di Indonesia salah satunya, PT KAI, Hekinus Manao merupakan komisaris sekaligus direktur informasi dan akuntansi Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 (Wordpress.com, 2017). Lalu pada perusahaan Toshiba Corp yang melaporkan kerugian bersih sebesar 10 miliar yen (Rp1,17 triliun) pada laporan keuangan tahun 2014-2015. Teknik manajemen laba yang digunakan melalui melakukan mark-up atas keuntungan US\$12 miliar dolar selama beberapa tahun yang dibuktikan dari hasil penyelidikan yang dilakukan akuntan independen (Kompas.com, 2015). Dan terjadi pada KAP Tanubrarata, Susanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mendapatkan sanksi dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang di berlakukan satu bulan sejak surat putusan ditandatangani. Kemenkeu tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menetapkan sanksi berupa pembekuan izin

selama 12 bulan pada Kasner Sirumapea yang berlaku sejak 27 Juli 2019. Sebab surat keputusan telah ditandatangani pada 27 Juni 2019. (Economy.okezone.com 2019).

Kasus tersebut membuktikan kondisi yang memungkinkan dampak yang terus membesar dan luasnya usaha yang harus dikelola pemilik, sehingga pemilik (*Shareholders*) tidak mampu mengelola usahanya secara langsung. Adanya pemisah kewenangan dan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) tersebut akan menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*).

Adanya audit yang merupakan salah satu solusi dalam mengurangi resiko ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar sebagai pemberi keputusan pengesahan terhadap laporan keuangan. Auditor diharapkan mampu membatasi terjadinya praktik manajemen laba serta meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan. Manajemen (*agen*) menganggap bahwa kesuksesan perusahaan dalam mencapai kinerja (*performace*) merupakan hasil kerjanya tanpa melihat kontribusi yang besar dari pihak lain termasuk didalamnya adalah pemilik (*shareholders*). Dalam kaitannya dengan masalah keagenan, beberapa ahli mengemukakan bahwa keberadaan agen dan prinsipal merupakan salah satu faktor yang menjadi dasar timbulnya teori keagenan (*agency theory*). Prinsipal memberikan kewenangan penuh terhadap pengawasan operasional perusahaan terhadap agen sehingga memberikan peluang kepada agen untuk melakukan praktik learning management. Adanya melakukan tindakan manajemen laba (*earning management*).

Komite Audit yang efektif bekerja sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, dan keterbukaan Dewan Komisaris. Tugas utama komite audit adalah memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan dan kontrol internal (KNCG, 2002). Terdapat beberapa karakteristik dalam penilaian kinerja komite audit yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja. Karakteristik tersebut salah satunya struktur komite audit (meliputi independensi, ukuran), pelatihan dan pemahaman komite audit, frekuensi pertemuan dan rapat komite audit, kegiatan komite audit, hubungan komite audit dengan auditor internal, akuntan publik dan manajemen dan peranan komite audit dimasa depan (KNKG).

Independensi merupakan salah satu yang terpenting dalam menilai kinerja

auditor internal, dan mengatasi konflik auditor eksternal dan berfungsi menilai objektivitas dan independensi auditor eksternal (IKAI, 2004). Arens (2015: 84) menyatakan independensi adalah cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi akuntan publik adalah sikap pikiran dan sikap mental akuntan publik yang jujur dan ahli, serta bebas dari bujukan, pengaruh, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Karakteristik lain yang dibutuhkan adalah *financial expertise*, jumlah rapat dan ukuran komite audit. Financial expertise diperlukan dalam suatu komite audit, menyangkut dalam tujuan komite audit yang memeriksa dan mengawasi proses pengerjaan laporan keuangan, dan untuk mengukur tingkat kerajinan komite audit bisa digunakan perhitungan pada jumlah pertemuan yang dilakukan komite audit selama satu periode.

Pendukung keanggotaan komite audit agar lebih efektif lagi menggunakan aturan yang direkomendasikan oleh KNKG, jumlah komite audit adalah sebanyak 3-5 orang. Frekuensi pertemuan merupakan salah satu kunci dalam kendala dan efisiensi kegiatan dan proses perusahaan. Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit. Pada prosesnya anggota dewan yang melakukan pertemuan secara rutin kemungkinan lebih besar untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dengan perhatian dan sukses. Direksi akan lebih efektif meningkatkan tingkat pengawasan dari proses pelaporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit.

Semakin berkembangnya zaman, kaca pada dunia audit semakin jadi sorotan dan semakin adanya perkembangan. Adanya peran komite audit dalam berupaya untuk menjamin kualitas dari laporan keuangan suatu perusahaan telah menjadi suatu pertimbangan yang berarti, terutama terhadap berbagai skandal yang telah dilakukan pihak manajemen perusahaan dan skandal akuntansi yang telah terjadi di beberapa perusahaan besar di Indonesia maupun di luar negeri. Pengkaitan antara nilai perusahaan dengan pelaporan laba, merupakan pemicu terjadinya tindakan manajemen perusahaan untuk menyajikan laba yang baik, karena adanya insentif ekonomi dan tekanan.

Menyangkut hal tersebut, Bursa Efek Jakarta mengeluarkan peraturan meyangkut pembentukan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris dewan bagi perusahaan publik yang terdaftar. Peraturan tersebut mewajibkan semua perusahaan yang tercatat memiliki komite audit. Yang menyatakan bahwasanya komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Keahlian dalam melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh kecakapan dan pengetahuan yang dibawakan dengan profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai hal yang penting, karakteristik seseorang berkaitan dengan kompetensi sebagai kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan. Selain itu, bapepam juga menegaskan bahwa adanya komite audit banyak membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan.

Berdasarkan hal yang penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Pengaruh Independensi, Ukuran Komite Audit, kompetensi dan frekuensi pertemuan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bei Periode 2015-2019.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Adanya ketidak samaan yang terjadi pada penelitian sebelumnya sehingga perumusan masalah pada penelitian kali ini. Dengan demikian penulis melakukan pengujian ulang menyangkut permasalahan terhadap manajemen laba , yaitu:

- 1) Apakah independensi berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen laba?
- 2) Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen laba?
- 3) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen laba?
- 4) Apakah frekuensi pertemuan berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen laba?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan hasil dan target penelitian yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang peneliti ajukan. Penelitian ini bertujuan dalam menyajikan bukti empiris yaitu:

- 1) Independensi mempengaruhi pelaksanaan manajemen laba.
- 2) Ukuran komite audit mempengaruhi pelaksanaan manajemen laba.
- 3) Kompetensi mempengaruhi pelaksanaan manajemen laba.
- 4) Frekuensi pertemuan mempengaruhi pelaksanaan manajemen laba.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna terutama pihak yang memiliki kepentingan. Dengan demikian, hasil analisis penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya:

- 1) Bagi ilmu pengetahuan  
Dibuatnya penelitian ini, bermaksud memberikan pengetahuan tambahan yang menyangkut pengaruh independensi, ukuran komite audit, kompetensi dan frekuensi pertemuan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan.
- 2) Bagi regulator
  - a. Penelitian ini juga bermanfaat terhadap pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku regulator pihak penyelenggara perdagangan di pasar modal Indonesia dalam menyeleksi perusahaan mana yang baik untuk membantu menaikkan nilai investasi dan ekspor.
  - b. Penelitian ini juga bermanfaat terhadap pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan regulator di bidang perpajakan dalam mengetahui apakah ada perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak.
  - c. Penelitian ini juga bermanfaat terhadap pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di pasar modal dalam memberikan peraturan terbaru yang bermanfaat untuk perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.
- 3) Bagi Investor
  - a. Penelitian ini bermanfaat terhadap pihak investor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam meningkatkan wawasan dan informasi terkait akuntansi, khususnya laporan laba rugi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi investor.
  - b. Penelitian ini bermanfaat terhadap pihak investor Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam meningkatkan wawasan dan informasi terkait akuntansi, khususnya laporan laba rugi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi investor.

- c. Penelitian ini bermanfaat terhadap pihak investor Perseorangan dalam meningkatkan wawasan dan informasi terkait akuntansi, khususnya laporan laba rugi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi investor.